

TANGGAPI KELUHAN WISATAWAN SOAL HARGA MAKANAN

PPLM Bantah Anggotanya Pasang Tarif Tinggi

YOGYA (KR) - Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), memberikan klarifikasi mengenai viralnya berita seorang wisatawan yang mengeluhkan dipatok tarif terlalu tinggi untuk seporsi pecel lele. Kejadian tersebut ternyata tidak terjadi di sepanjang Jalan Malioboro dan tidak dilakukan anggota pedagang lesehan.

PPLM menyangkan pernyataan netizen tersebut sehingga merugikan citra pedagang lesehan di sepanjang Jalan Malioboro.

Ketua PPLM Desio Hartonowati menyatakan, dari hasil investigasi dan penelusuran kepada seluruh anggota pedagang lesehan Malioboro, lokasi pengambilan gambar video tersebut di Jalan Perwakilan dan bukan di Jalan Malioboro. PPLM merasa dirugikan dan

menyangkan viralnya pemberitaan tersebut yang memberi persepsi seolah-olah kejadian tersebut terjadi di Jalan Malioboro.

"Kami menyerahkan sekaligus mendukung sepenuhnya langkah-langkah dan tindakan yang telah dan akan diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkaitan dengan masalah ini," ujar Desio Hartonowati di Yogyakarta, Kamis (27/5).

Dikatakan, Selama ini PPLM telah bekerjasama dengan Pemkot Yogyakarta, terutama terkait kepatuhan menerapkan daftar harga secara transparan dan wajar. Bahkan, sebelum Lebaran, pihaknya telah menyerahkan daftar seluruh harga makanan dan minuman kepada Pemkot Yogyakarta hingga melakukan pemantauan bersama pelaksanaan di lapangan.

"Kami akan mengajak Pemkot Yogyakarta dan insan pariwisata untuk mensosialisasikan lebih masif kepada pengunjung agar hanya membeli makanan di tempat yang memasang daftar harga. Hal itu untuk mencegah kejadian yang merugikan konsumen. Selain itu, wisatawan agar jangan sungkan

dan ragu untuk bertanya harga makanan dan minuman sebelum memesannya," tandasnya.

PPLM juga akan mendorong dan ikut mensosialisasikan adanya posko informasi, pengaduan, dan keluhan bagi konsumen di Jalan Malioboro dengan hot line yang siap 24 jam untuk tempat bertanya dan menampung keluhan pengunjung. Hal ini sebagai salah satu upaya agar tidak lagi terjadi lagi kejadian semacam ini di masa depan.

"Kami meminta seluruh media, lembaga, netizen dan warga membantu mensosialisasikan klarifikasi dan informasi ini agar citra lesehan di sepanjang Jalan Malioboro kembali pulih," imbu Desio. (Ira)-f

HUT KE-98 RS MATA 'DR YAP' Baksos Operasi Katarak dan Pterygium



KR-Istimewa

Baksos operasi katarak dalam rangka HUT ke-98 RS Mata Dr Yap.

YOGYA (KR) - Rumah Sakit (RS) Mata 'Dr Yap' Yogyakarta mengadakan bakti sosial operasi katarak dan pterygium gratis bagi warga pra-sejahtera, Rabu (26/5). Baksos dalam rangka memperingati HUT ke-98 RS Mata Dr Yap.

Direktur Utama RS Mata Dr Yap, dr Alida Lienawati MKes mengatakan, jumlah pasien yang dioperasi sebanyak 36 pasien terdiri 25 pasien operasi katarak dan 11 pasien operasi pterygium. Para pasien tersebut berasal dari DIY, Magelang dan sekitarnya. Pterygium adalah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata yang bisa mencapai kornea.

"RS Mata Dr YAP rutin melaksanakan kegiatan yang ditujukan bagi masyarakat dengan kebutaan dan gangguan penglihatan, salah satunya bakti sosial operasi mata," terang Alida kepada wartawan disela baksos. Turut hadir dalam acara, Ketua Umum Yayasan Dr Yap Prawirohusodo, GBPH Prabukusumo dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Dr Yap Prawirohusodo KPH Indrokusumo.

Menurut Alida, operasi katarak dan pterygium dalam baksos ini dikerjakan oleh dokter-dokter spesialis konsultan terbaik dan didukung peralatan serta teknologi terbaru operasi mata yang dimiliki RS Mata Dr Yap. Sebelum pelaksanaan operasi, diadakan screening pra-operasi pada 24-25 Mei 2021.

GBPH Prabukusumo mengatakan, RS Mata Dr Yap merupakan rumah sakit khusus mata di bawah Yayasan Dr Yap Prawirohusodo yang sudah berpengalaman memberi pelayanan kesehatan mata lebih dari 97 tahun. RS Mata Dr Yap didukung tenaga medis yang profesional dan berpengalaman menangani kasus-kasus penyakit mata dengan berbagai penyulit.

Sejalan dengan visi RS Mata "Dr Yap untuk menjadi pusat pelayanan dan pendidikan mata yang profesional dan terpercaya serta bersaing secara global di tahun 2023, maka RS Mata Dr Yap berkomitmen untuk berperan aktif dalam menurunkan angka kebutaan di Indonesia, terutama kebutaan yang bisa dicegah seperti katarak dan pterygium. (Dev)-f

BERI PELUANG AKSES SMP NEGERI WARGA KOTA

Kuota Zonasi Mutu PPDB 2021 Diperbesar

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memperbesar kuota zonasi mutu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri bagi penduduk Kota Yogya. Upaya tersebut guna memberikan peluang atau akses yang lebih luas bagi penduduk Kota Yogya di tengah kebijakan zonasi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya Dedi Budiono, menyebutkan pada tahun lalu kuota zonasi mutu diputuskan 35 persen, sedangkan tahun ini naik menjadi 39 persen. "Ini untuk mengakomodir siswa Kota Yogya yang wilayahnya jauh dari SMP negeri," jelasnya di sela jumpa media, Kamis (27/5).

Kuota tersebut dalam aplikasinya juga berpeluang semakin besar. Terutama jika kuota dari jalur lain tidak terserap 100 persen sehingga otomatis sisanya masuk ke jalur zonasi mutu. Hal ini karena zonasi mutu diselenggarakan paling akhir dari jalur lainnya.

Dedi menandakan, dalam PPDB SMP negeri di Kota Yogya terdapat empat jalur. Masing-masing jalur prestasi atau bibit unggul, jalur zonasi wilayah dan mutu, jalur afirmasi bagi penduduk miskin dan difabel, dan jalur mutasi orang tua bagi pejabat negara.

"Skemanya tidak ada perbedaan dengan tahun lalu. Hanya kuota dari tiap jalur tersebut kami

sesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan kondisi terkini," imbuhnya.

Semenjak kebijakan PPDB menerapkan sistem zonasi, penduduk Kota Yogya di bagian selatan dan timur kerap mengeluhkan kondisi blankspot. Hal ini karena di kedua wilayah tersebut sangat minim sekolah negeri jenjang SMP. Pasalnya SMP negeri tersebut banyak berada di Yogya tengah maupun utara. Akibat lokasi sekolah yang belum merata maka banyak orangtua siswa mengeluhkan sistem zonasi.

Kendati demikian, Pemkot Yogya mengambil kebijakan untuk memperbanyak akses atau peluang bagi

siswa yang berasal dari Kota Yogya. Setidaknya terdapat tiga peluang sistem PPDB yang dapat diikuti. Jika kalah bersaing dengan jalur prestasi, maka bisa mengikuti jalur zonasi wilayah. Namun jika masih kalah bersaing, masih berkesempatan memanfaatkan jalur zonasi mutu. Khusus bagi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) bahkan bisa mengikuti jalur afirmasi.

"Harapan kami masyarakat memperoleh hak pendidikan yang sama meski lokasi sekolah belum merata. Setiap tahun juga selalu dievaluasi agar ada perbaikan di tahun selanjutnya," tandas Dedi. (Dhi)-f

PENDAFTARAN DIMULAI PEKAN INI Lelang Enam Jabatan Tinggi Pratama

YOGYA (KR) - Pemda DIY kembali melakukan lelang sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi beberapa kekosongan yang ada. JPT Pratama yang kosong tersebut di antaranya adalah Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM). Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Kepala Biro Hukum Setda DIY, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY.

"Untuk pendaftaran JPT Pratama sudah mulai dibuka sejak pekan ini baik secara online dan offline melalui panitia lelang jabatan, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY. Kami berharap semua tahapannya bisa dilakukan secara lancar, kredibel dan transparan. Untuk itu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan segera mendaftar dan melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Yogyakarta, Kamis (27/5).

Diungkapkan, pendaftaran administrasi akan dibuka selama lima hari kerja yang dimulai pekan ini. Pihaknya berharap semua tahapan seleksi bisa dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Dengan begitu JPT Pratama bisa segera terisi dan dilantik pada akhir Juni mendatang. Mengingat pentingnya jabatan tersebut untuk segera diisi oleh kepala definitif atau penanggung jawabnya sehingga tidak perlu ada pelaksana tugas (Plt). Pasalnya dengan ada pejabat definitif akan terkonsentrasi dengan jabatannya. Berbeda dengan Plt yang memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan. Selain itu para Plt juga konsentrasinya terbagi dengan jabatan definitif yang diemban.

"Selama ini beberapa jabatan yang kosong dijabat oleh Plt. Mudah-mudahan semua tahapannya lancar dan kekosongan itu segera terisi. Untuk itu bagi kawan-kawan yang secara administrasi dan kompetensi memenuhi persyaratan silakan mendaftar. Dimana untuk kali ini setiap peserta lelang atau pendaftar kita beri kesempatan memilih dua pilihan (JPT Pratama)," terang Baskara Aji. (Ria)-f

Pemda DIY Dapat Kuota CPNS 56 Formasi

YOGYA (KR) - Pemda DIY kembali membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Berbeda dari tahun sebelumnya, dalam proses rekrutmen kali ini dibuka untuk formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Untuk tahun ini Pemda DIY mendapatkan jatah 56 formasi CPNS. Selain formasi CPNS, DIY juga mendapatkan kuota 210 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) baik untuk guru dan nonguru.

"Kalau CPNS kita dapatkan kuota sebanyak 56 orang. Adapun untuk formasi detailnya kita tunggu saja nanti saat pengumuman pendaftaran. Awalnya yang terbanyak itu untuk guru tetapi kalau sekarang kan guru masuknya PPPK. Untuk PPPK guru jumlah yang disetujui oleh pemerintah pusat sebanyak 184 formasi, sedangkan untuk PPPK teknis nonguru ada sebanyak 26 formasi," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani di Yogyakarta, Rabu (26/5).

Amin mengungkapkan, berdasarkan informasi

yang diterima pendaftaran seleksi CPNS akan dimulai pada akhir Mei hingga Juni 2021. Mengingat saat ini masih dalam suasana pandemi semua tahapan seleksi dilakukan dengan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat, untuk mencegah penularan Covid-19.

"Kalau untuk pelaksanaan dan mekanisme seleksi kemungkinan tidak jauh berbeda dari tahun lalu, tentunya dengan Prokes ketat. Mengingat pelaksanaan seleksi dilakukan secara objektif

dan transparan, masyarakat diimbau agar tidak percaya dengan oknum yang menjanjikan bisa meloloskan seleksi dengan imbalan tertentu," terangnya.

Amin Purwani menyatakan, kesiapan pelaksanaan CPNS untuk panitia seleksi (Pansel) langsung dari pusat (BKN). Jadi untuk pelaksanaannya BKD DIY lebih memilih untuk menunggu kepastian dari pusat. Untuk itu BKD DIY berharap bisa segera ada kejelasan atau kepastian dari pusat. (Ria)-f

DPRD KOTA YOGYAKARTA
 SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PROTOKOL KESEHATAN TIDAK BOLEH DIABAIKAN Ekonomi Tumbuh, Produktivitas Kinerja Harus Meningkatkan

YOGYA (KR) - Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogya mulai menunjukkan pertumbuhan meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kinerja dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta HM Fursan SE, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Yogya ini pun mendapat apresiasi dari pusat. "Kita semua berharap pertumbuhan ekonomi semakin baik. Ibarat gayung bersambut, kita harus terus optimis dengan meningkatkan kinerja dengan protokol yang disiplin," jelasnya.

Anggota Fraksi PAN ini pun sempat melakukan pendampingan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogya dan ditemui secara langsung oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Dra Indah Anggoro Putri MBus. Pada kesempatan tersebut pihaknya berdiskusi banyak hal berkaitan persoalan ketenagakerjaan di daerah. Salah satunya menyangkut produktivitas kinerja untuk meningkatkan daya saing daerah.

Fursan juga tidak menampik, dampak pandemi banyak tenaga kerja di Kota Yogya yang terpaksa

HM Fursan SE
Wakil Ketua DPRD
Anggota Fraksi PAN



KR-Ardhi Wahdan

dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka yang sebelumnya tercover jaminan melalui BP Jamsostek maupun BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan, otomatis ikut terhenti. Kalangan dewan pun mengusulkan agar mereka tetap bisa menikmati jaminan dengan subsidi dari Pemkot Yogya. "Rencananya anggaran tersebut akan dimasukkan ke dalam KUA PPAS. Sudah ada kalkulasi kebutuhannya dan tidak akan membebani keuangan daerah," urainya.

Dengan adanya fasilitasi pembayaran iuran untuk BPJS Kesehatan maupun BP Jamsostek, diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi pekerja yang di PHK maupun dirumahkan tersebut.

Di samping itu, perlindungan juga menyangkut kepastian hak pekerja. Sesuai regulasi ada perbedaan antara tenaga honorer, kontrak, magang, outsourcing maupun casual. Terutama karyawan casual atau yang tidak memiliki jam kerja tetap. Karyawan tersebut biasanya baru dibutuhkan jika volume pekerjaan meningkat. "Kepastian status pekerja itu akan menentukan hak mereka. Tetapi dalam masa pandemi ini semua harus disiplin menerapkan protokol. Jangan sampai abai meski sudah berlangsung lebih dari setahun," katanya. (Dhi)-f

Manna Kampus
BELANJA AMAN DI MANNA KAMPUS
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
WALAH CUCI TANGAN MEMAKAI MASKER
GEK SUDAH TURUN PERSEDIAAN DISTANSING

36 TAHUN
BUKA SETIAP HARI
PUKUL 09.00 - 21.00 WIB

28 MEI 2021

LEBIH MURAH

KUNCI MAS 210g Rp 27.350 Rp 29.070	LUMBUNG PADI 5kg Rp 58.200 Rp 64.000	DOWNY 1500ml Rp 31.375	SUNLIGHT 750ml Rp 12.000 Rp 14.945
--	--	---------------------------	--

JL. JOGJA-SOLO KM. 7 BABARSARI YOGYAKARTA TELP. 0274 - 485288
JL. C. SIMANJUNTAK 70 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 561254
JL. MENTERI SUPENO NO. 38 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 386797
JL. PALAGAN TENTARA PELAJAR NO. 31 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 869990
JL. GODEAN KM. 2,8 YOGYAKARTA TELP. 0274 - 565612